PENGEMBANGAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN IPB

oleh: Kudang B. Seminar[1] dan Yuyu Yulia[2]

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa koleksi item pustaka bagi perpustakaan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perpustakaan. Untuk itu tugas utama setiap perpustakaan adalah membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemakai perpustakaan. Dalam ilmu perpustakaan istilah untuk membangun koleksi perpustakaan dikenal dengan istilah *pengembangan koleksi.* Kegiatan pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan mulai dari kegiatan seleksi sampai evaluasi. Koleksi perpustakaan harus terbina dari suatu seleksi yang sistematis dan terarah disesuaikan dengan tujuan, rencana, dan anggaran yang tersedia.

Untuk membangun koleksi perpustakaan diperlukan kebijakan yang memandu pengembangan koleksi. Dengan kebijakan pengembangan koleksi, perpustakaan memiliki pegangan untuk mengembangkan koleksinya. Selain itu, perpustakaan juga akan memiliki kekuatan resmi untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaga. Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang selalu membina koleksinya. Pengembangan koleksi harus didasari atas azas tertentu, yang harus dipegang teguh. Perpustakaan harus menjaga agar koleksinya berimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan dosen, mahasiswa, dan peneliti. Demikian pula kebutuhan kurikulum perlu diperhatikan.

Penyelenggaraan pengembangan koleksi memerlukan dua hal pokok: *manajemen* dan *sumberdana* yang harus mamadai. Manajemen mencakup azas dan tujuan, metoda dan alat bantu, organisasi dan penjadwalan, serta pemantauan dan evaluasi pengembangan koleksi

[1] Kepala Perpustakaan IPB
[2] Kepala Bidang Pengembangan Item Pustaka - Perpustakaan IPB

perpustakaan. Manajemen menghasilkan rencana usulan anggaran yang baik serta pencapaian efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang layak untuk pengembangan koleksi perpustakaan yang mampu menunjang kurikulum, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat perguruan tingginya. Namun, rencana anggaran tidak selalu sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Sampai saat ini tidak ada rumus umum untuk menentukan berapa dana yang harus dialokasikan untuk perpustakaan. Dalam Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (1994) dikatakan bahwa dana perpustakaan adalah sekurang-kurangnya lima persen dari dana universitasnya. Terdapat berbagai sumber dana bagi perpustakaan, yaitu dari pemerintah berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan tidak tetap besarnya, bergantung kepada usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui Daftar Usulan Proyek (DUP). Sumber dana lainnya yang berasal dari masyarakat, berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang besarnya berbeda untuk setiap perguruan tinggi. Dana yang sifatnya tambahan (suplemen) tergantung kepada tahun anggaran pemberi dana. Dana yang berasal dari berbagai sumber itu hendaknya dimanfaatkan dengan bijaksana agar jangan terjadi pembelanjaan yang tumpang tindih. Disinilah peran vital dari fungsi manajemen yang harus melakukan resolusi kritis terhadap *gap* antara rencana anggaran dan ketersediaan dana.

Tulisan ini merupakan kajian terhadap pengadaan item pustaka di Perpustakaan IPB selama lima tahun terakhir, baik ditinjau dari segi anggaran, organisasi, mekanisme pengadaan, jumlah dan jenis anggaran serta item pustaka yang dihasilkan. Dengan tulisan ini akan diperoleh gambaran perkembangan pengadaan item pustaka di Perpustakaan IPB, yang berguna sebagai referensi untuk pelaksanaan pengembangan koleksi selanjutnya.

PEMBINAAN ITEM PUSTAKA

1. Anggaran

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dana pengadaan item pustaka terdiri dari beberapa sumber diantaranya adalah anggaran pembangunan dan dana masyarakat. Demikian pula halnya di IPB, untuk pengembangan koleksi perpustakaan sumber dana yang digunakan pada awalnya adalah dana masyarakat dan dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini bersumber pada anggaran pembangunan. Adapun jumlah dana pembangunan yang telah disediakan pada kurun waktu lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Dana Pengadaan Item Pustaka dari Anggaran Pembangunan (Dana DIP)

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA (Rp.)			JUMLAH TOTAL
	Buku	Jurnal Luar Negeri	Jurnal Dalam Negeri	
1999/2000	100.000.000	80.000.000	20.000.000	200.000.000
2001	400.000.000	100.000.000	20.000.000	520.000.000
2002	100.000.000	100.000.000	20.000.000	220.000.000
2003	300.000.000	120.000.000	30.000.000	450.000.000
2004	350.000.000	135.000.000	15.000.000	500.000.000
Jumlah	1.250.000.000	535.000.000	105.000.000	1.890.000.000

Disamping itu pada tahun 2001 dan 2002 terdapat dana tambahan yang dikenal dengan dana DIKS yang jumlahnya berturut-turut sebesar Rp. 43.000.000,- dan Rp. 51.000.000,-. Anggaran ini dikhususkan untuk buku-buku ilmu sosial yang mendukung program pendidikan pascasarjana.

Jumlah anggaran pengadaan buku dari dana DIP setiap tahunnya naik kecuali tahun 2002 mengalami penurunan. Tahun 2002 merupakan awal dari sistim pengadaan dengan cara swakelola. Cara pengadaan item pustaka yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1999/2000 dan tahun 2001 menggunakan sistem pelelangan, dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 menggunakan sistem swakelola. Fluktuasi jumlah anggaran yang ditetapkan IPB untuk pengadaan buku secara jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

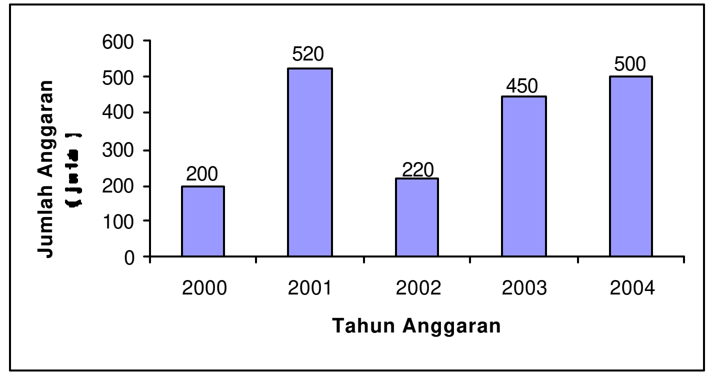

Gambar 1. Diagram Jumlah Anggaran Pengadaan Item Pustaka

Dari anggaran yang direncanakan seperti pada Tabel 1, dalam pelaksanaannya dana yang digunakan untuk pengadaan item pustaka tidak semua dapat direalisasikan. Dengan sistem lelang dana yang digunakan sesuai dengan nilai kontrak yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan dengan sistem swakelola disesuaikan dengan besarnya dana yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah jumlah dana yang telah digunakan dalam pengadaan item pustaka dalam lima tahun terakhir ini.

Tabel 2. Jumlah Dana Yang Digunakan dalam Pengadaan Item Pustaka

SISTEM PENGADAAN	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA (Rp.)			JUMLAH TOTAL
		Buku	Jurnal Luar Negeri	Jurnal Dalam Negeri	
Lelang	1999/2000	97.999.300	78.571.250	19.732.900	196.303.450
Lelang	2001	307.984.400	95.530.000*)	-	403.514.400
Swakelola	2002	99.996.707	99.770.500	19.558.410	219.325.617
Swakelola	2003	295.348.769	119.350.486	10.461.550	425.160.805
Swakelola	2004**)	350.000.000	135.000.000	15.000.000	500.000.000
	Jumlah	1.151.329.176	528.222.236	64.752.860	1.744.304.272

*) jurnal luar negeri dan dalam negeri
**) masih dalam proses pengadaan

Dana yang telah ditetapkan IPB untuk pengadaan item pustaka belum semua dapat dimanfaatkan untuk pengadaan item pustaka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terserapnya semua dana, diantaranya adalah sebagian besar dana yang diterima pada akhir tahun anggaran yaitu bulan Desember. Untuk menanggulangi ini pimpinan IPB telah berusaha untuk memberikan dana talangan untuk pengadaan item pustaka tersebut. Mudah-mudahan masa yang akan datang perpustakaan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Realisasi dana yang telah digunakan dalam pengadaan item pustaka dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

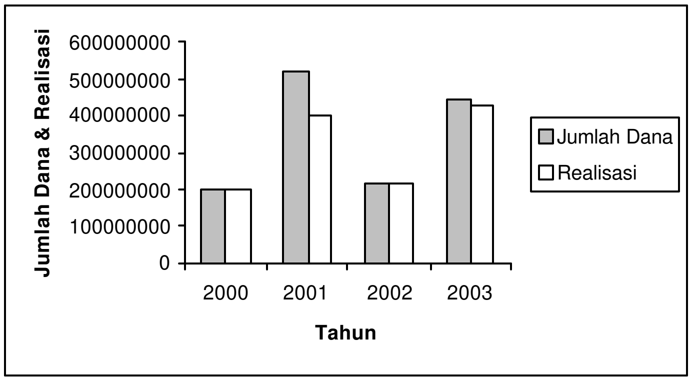

Gambar 2. Diagram Jumlah Anggaran Pengadaan Item Pustaka

2. Organisasi

Pada awalnya pengembangan koleksi perpustakaan dikelola oleh Bidang Pembinaan Bahan Pustaka. Setelah reorganisasi, dilakukan penggabungan antara Bidang Pembinaan Bahan Pustaka dan Pengolahan Bahan Pustaka menjadi Bidang Pembinaan dan Pengolahan Informasi dan Dokumen (PPID). Seiring dengan pergantian pimpinan perpustakaan, Bidang PPID diganti menjadi Bidang Pengembangan Item Pustaka (PIP). Pengadaan Item Pustaka ditangani oleh Sub Bidang Pembinaan Item Pustaka yang berada di bawah Bidang PIP.

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan Item Pustaka adalah meliputi kegiatan memilih, mengadakan, dan menginventarisasi item pustaka sesuai dengan kebijakan pengembangan koleksi yang telah ditetapkan. Sub Bidang Pembinaan Item Pustaka dipimpin oleh satu orang pustakawan yang membawahi tiga orang staf. Pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan jenis item pustaka, yaitu satu orang mengelola jenis monograf yang mencakup buku, skripsi, tesis dan disertasi, satu orang mengelola terbitan berseri yang mencakup majalah, terbitan sekunder, dan terbitan Biro Pusat Statistik (BPS), dan satu orang lagi adalah bagian umum, yaitu membantu kegiatan administrasi baik pada sub bidang pembinaan item pustaka maupun sub bidang pengolahan item Pustaka, yang kedua-duanya berada di bawah Bidang Pengembangan Item Pustaka.

Dalam kegiatan pengadaan item pustaka, Perpustakaan IPB setiap tahunnya membentuk tim pengadaan item pustaka. Pembentukan tim ini berkaitan dengan pengadaan item pustaka menggunakan anggaran pembangunan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut Perpustakaan IPB ditugaskan untuk membelanjakan sendiri buku dan majalah baik melalui penerbit dalam negeri maupun penerbit luar negeri, atau yang dikenal dengan istilah **swakelola.**

Tim Pengadaan Item Pustaka terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai deskripsi kerja sebagai berikut:

1) **Penanggung Jawab Kegiatan**: bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengadaan item pustaka baik dalam segi teknis, administrasi, maupun keuangan.
2) **Pemegang Uang Muka (PUMK)**: melakukan hubungan kerja dengan Proyek P2T ataupun dengan Direktorat Keuangan dalam kaitan pendanaan pengadaan item pustaka ataupunpertanggung jawaban keuangannya.
3) **Koordinator Pelaksana**: melakukan koordinasi antara PUMK dengan anggota tim pengadaan item pustaka, ataupun antara anggota tim dalam kegiatan proses pengadaan mulai dari menghubungi penerbit, pembayaran, dan pertanggung jawabannya.

4) **Anggota**, terdiri dari :

(1) Pelaksana administrasi pengadaan, yaitu melaksanakan kegiatan administrasi pengadaan mulai dari menghubungi penerbit sampai administrasi pembayarannya

(2) Pemegang kas dan pelaksana pembayaran, yaitu menerima uang dari PUMK, melaksanakan pembayaran, baik melalui bank ataupun langsung ke penerbit untuk majalah dalam negeri.

(3) Pelaksana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan, yaitu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan untuk pengadaan item pustaka.

3. Pemilihan Item Pustaka

Yang dimaksud dengan pemilihan (*selection*) item pustaka adalah proses mengidentifikasi item pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Pengembangan koleksi meliputi kegiatan memilih dan mengadakan pustaka sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pustakawan bersama-sama dengan sivitas akademika perguruan tinggi. Pengembangan koleksi dilakukan berdasarkan azas berikut ini:

1) **Relevansi.** Koleksi hendaknya relevan dengan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat perguruan tingginya.

2) **Berorientasi kepada kebutuhan pengguna**. Pengembangan koleksi harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pengguna Pengguna perpustakaan perguruan tinggi adalah tenaga pengajar, tenaga peneliti, tenga administrasi, mahasiswa, dan alimni yang kebuthannyaakan informasi berbeda-beda.

3) **Kelengkapan**. Koleksi hendaknya jangan hanya terdiri atas buku ajar yang langsung dipakai dalam perkuliahan saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu yang berkaitan dengan program yang ada secara lengkap.

4) **Kemutahiran**. Koleksi hendaknya mencerminkan kemutahiran. Ini berarti bahwa perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui pustaka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

5) **Kerja sama**. Koleksi hendaknya merupakan hasil kerja sama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Dengan kerja sama, diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan pemilihan item pustaka yang dilaksanakan perpustakaan IPB adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Melakukan survei kebutuhan item pustaka ke setiap departemen yang ada di lingkungan IPB

2) Menerima permintaan kebutuhan dari departemen

3) Melakukan verifikasi dengan cara melakukan pengecekan secara berturut-turut ke (1) pangkalan data perpustakaan IPB; (2) katalog penerbit tercetak maupun digital (CD-ROM dan internet).

4) Membuat daftar usulan pengadaan sesuai dengan besarnya anggaran.

5) Melakukan pengadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di IPB

4. Pengadaan Item Pustaka

Pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan cara pembelian, hadiah dan pertukaran. Banyak sekali lembaga/instansi pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang memberikan buku-buku dan majalah secara cuma-cuma ke perpustakaan IPB. Bahkan Bank Dunia menunjuk Perpustakaan IPB sebagai salah satu perpustakaan deposit di Indonesia untuk semua terbitan Bank Dunia. Disamping itu Perpustakaan IPB diberi wewenang untuk menyebarkan terbitan Pascasarjana IPB yang berjudul *Forum Pascasarjana* untuk didistribusikan sebagai hadiah dan bahan pertukaran ke lembaga/instansi lain yang sudah menjalin kerjasama dengan IPB.

Untuk membangun koleksi perpustakaan disamping dengan cara menerima hadiah dan hasil pertukaran, perpustakaan IPB memiliki dana untuk pembelian item pustaka baik yang berasal dari dana masyarakat maupun dari anggaran pembangunan. Cara pengadaan yang telah dilakukan selama ini oleh perpustakaan perguruan tinggi negeri adalah dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan kepada proyek pengadaan barang yaitu Keppres nomor 17 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Menurut Keppres tersebut pengadaan barang dilaku kan melalui empat macam cara yaitu: (1) pelelangan, (2) pemilihan langsung, (3) penunjukkan langsung, (4) swakelola. Pada awalnya pengadaan item pustaka dilakukan dengan cara penunjukkan langsung kemudian beralih ke sistem pelelangan, dan pada tahun 2002 sampai sekarang perpustakaan berusaha untuk melakukan pengadaan dengan cara swakelola.

Pada awal akan melakukan pengadaan secara swakelola, perpustakaan IPB melakukan studi banding ke Pustaka yang telah terlebih dahulu melakukan sistem swakelola, kemudian melakukan penjajakan ke Kantor Perbendaharaan Negara, dan ternyata pengadaan item pustaka bisa dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan peraturan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perpustakaan IPB meminta persetujuan dari Rektor dan Pemimpin proyek P2T untuk melakukan pengadaan secara langsung ke penerbit. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana pemerintah sehingga item pustaka yang dihasilkan lebih optimal. Gambar 3 berikut ini adalah mekanisme pengadaan secara swakelola yang telah dilaksanakan di IPB.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari Rektor, dan mendapatkan informasi tentang besarnya anggaran untuk pengadaan item pustaka, maka selanjutnya perpustakaan membuat usulan pengadaan item pustaka sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya perpustakaan melakukan proses pengadaan mulai dari permintaan proforma invoice ke penerbit, kemudian meminta dana talangan dari Direktorat Keuangan IPB, sampai menyelesaikan pertanggungjawaban ke Proyek Peningkatan Perguruan tinggi (P2T).

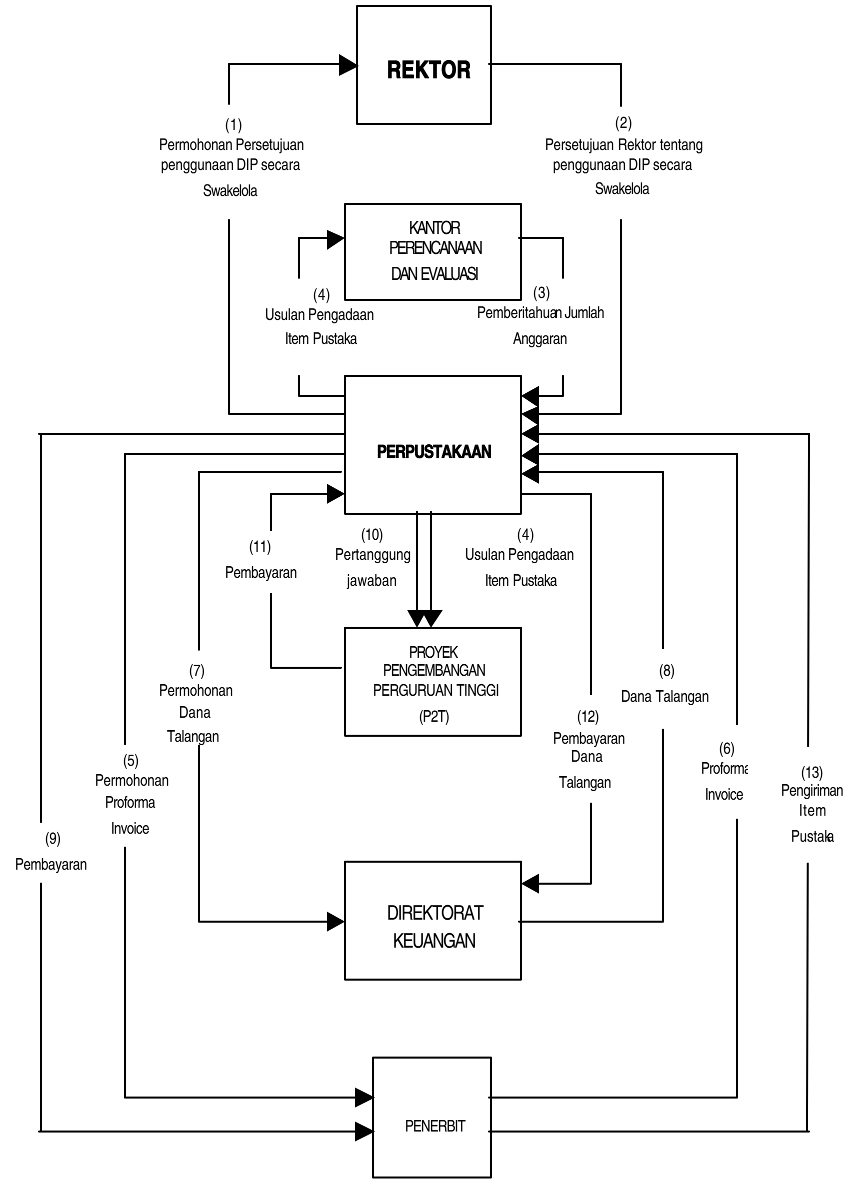

Gambar 3. Mekanisme Sistem Pengadaan Item Pustaka Secara swakelola

5. Pengembangan Koleksi Pustaka Elektonik (*e-collections*)

Di era digital dan virtual telah berkembang penyediaan layanan pustaka koleksi elektronik (*e-collections*) seperti *e-books, e-journals, e-magazines* yang sudah ditawarkan oleh beberapa provider maupun penerbit *e-collections* seperti OCLC (*On-Line Computer Library Center*), Elsevier, Inc., dan Oxford University Press, bahkan sebagian besar penerbit jurnal asing menawarkan jurnal on-line (*e-journals*). Penyediaan layanan elektronik ini memiliki beberapa keuntungan antara lain (1) dapat diakses secara simultan oleh multiuser, sehingga tidak perlu biaya replikasi *hardcopy* dari item tersebut, (2) sistem penelusuran yang lebih cepat dan kontekstual, (3) jaminan update versi item yang terbaru, (4) perawatan fisik item yang lebih ringan karena dibebankan ke pihak provider *e-collections*.

Namun ada beberapa kendala untuk pengadaan *e-collections* tersebut antara lain:

1) Biaya pembelian yang tinggi; untuk OCLC misalnya harga 1 buku elektronik sama dengan harga pembelian harcopynya + harga akses on-line yang hanya berlaku untuk beberapa tahun perioda,
2) Bandwidth jalur Internet di Indonesia yang terbatas; dengan bandwidth yang rendah khususnya di Indonesia menyebabkan volume informasi yang dapat diakses persatuan waktu menjadi terbatas,
3) Keterbatasan ketersediaan infrastruktur ICT (*Information & Communication Technology*) di lingkungan kampus, perpustakaan, dan masyarakat pengguna; akses *e-collections* memerlukan infrastruktur teknologi yang tidak murah bagi penggunanya seperti komputer, dan jaringan ke Internet,
4) Ketaksesuaian dan dengan sistem administrasi keuangan di Indonesia; pengadaan *e-collections* yang wujudnya bukan merupakan item fisik tidak dapat dipertanggungjawabkan ke penyelenggara pengawasan keuangan negara yang masih berorientasi pada bukti pengadaan berupa item fisik.

Beberapa opsi solusi terhadap kendala tersebut adalah *berbagi beban pembiayaan* (*cost sharing*) antar Instansi Perpustakaan dalam

suatu konsorsium. Beberapa negara seperti Korea, Singapore, Hongkong telah memiliki konsorsium perpustakaan yang memungkinkan *cost sharing* untuk pengembangan layanan dan pengadaan *e-collections.* Hal ini pernah dibahas pada pertemuan Perguruan Tinggi BHMN di UGM Yogyakarta pada tanggal 20-21 Agustus 2004 yang telah sepakat untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan digital bersama di Indonesia. Selain itu pimpinan Universitas perlu mengupayakan terobosan baru dalam mendukung pengadaan dan pendanaan pengembangan koleksi elektronik tersebut, sehingga tidak terhambat oleh prosedur administrasi keuangan yang tidak kompatibel. Beberapa Perguruan Tinggi BHMN seperti ITB dan UGM telah memulai pengadaan *e-collections*.

6. Jumlah Item Pustaka yang dihasilkan

Perolehan item pustaka dalam kurun waktu empat tahun ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Perolehan Item Pustaka dari Anggaran Pembangunan

Tahun Anggaran	Jumlah Item Pustaka (judul)			
	Buku		Jurnal Luar Negeri	Jurnal Dalam negeri
	Luar negeri	Dalam negeri		
1999/2000	90	50	11	80
2001	237	30	13	117
2002	127	40	31	91
2003	299	401	38	100
Jumlah	753	521	93	388

Untuk tahun anggaran 2004 sedang dalam proses pengadaan sehingga datanya belum dapat ditampilkan. Dari empat tahun pengadaan item pustaka, jumlah dana yang paling banyak adalah pada tahun 2003 yaitu Rp. 425.160.805, sehingga jumlah item pustaka yang dihasilkan juga paling banyak. Dan jumlah item pustaka yang paling sedikit adalah pada tahun anggaran 1999/2000 dengan jumlah dana Rp. 196.303.450.

Harga satuan item pustaka yang dihasilkan setiap tahunnya berbeda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi harga satuan item pustaka, diantaranya adalah adanya kenaikan harga, nilai mata uang asing, dan cara pengadaanya. Sebagai contoh pada tahun anggaran 1999/2000 untuk jurnal luar negeri dengan jumlah dana Rp. 78.571.250 hasil yang didapat adalah 11 judul jurnal. Harga satuan jurnal luar negeri rata-rata adalah Rp. 7.142.841. Sedangkan dengan jumlah dana Rp. 119.350.486 hasil yang didapat adalah 38 judul jurnal dengan harga satuan Rp. 3.140.802.

Dengan melihat kondisi di atas, cara swakelola dapat menghasilkan item pustaka yang lebih banyak dari pada cara pelelangan. Hal ini disebabkan karena dengan cara swakelola penggunaan dana 100 persen untuk item pustaka, sehingga dapat mengoptimalkan item pustaka yang diadakan.

PENUTUP

Pengadaan item pustaka dengan cara swakelola merupakan cara yang perlu dilakukan untuk dapat memanfaatkan dana pemerintah seefisien dan seefektif mungkin. Cara pengadaan ini perlu ditunjang oleh sistem manajemen yang baik sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan pengadaan tersebut. Disamping itu dukungan para pimpinan IPB sangat diperlukan agar kegiatan pengadaan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan adanya kepercayaan terhadap Perpustakaan IPB untuk mengelola pengadaan secara swakelola, maka diharapkan Perpustakaan IPB dapat lebih profesioanl lagi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Buku Pedoman Perpsutakaan Perguruan Tinggi. Jakarta : Dikti-Depdikbud.

Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan. 2000. Laporan Pengadaan Buku Ilmiah dan Jurnal Ilmiah. Bogor : Perpustakaan IPB.

Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan. 2001. Laporan Pengadaan Buku Ilmiah dan Jurnal Ilmiah. Bogor : Perpustakaan IPB.

Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan. 2002. Laporan Pengadaan Buku Ilmiah dan Jurnal Ilmiah. Bogor : Perpustakaan IPB.

Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan. 2003. Laporan Pengadaan Buku Ilmiah dan Jurnal Ilmiah. Bogor : Perpustakaan IPB.

Institut Pertanian Bogor. Perpustakaan. 2003. Usulan Kegiatan Pengadaan Buku Ilmiah dan Jurnal Ilmiah. Bogor : Perpustakaan IPB.

MWA-IPB. 2003. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 17/MWA-IPB/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor.

Saleh, Abdul Rahman. Janti G. Sujana, dan Yuyu Yulia. 2003. Membelanjakan Dana DIP Langsung ke Penerbit (Swakelola): Suatu Pengalaman Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Media Pustakawan. Vol. 10, No. 3, P. 8-11.